

KUMPULAN *KLIPPING* BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Hal. 2)	31 Agustus 2019	Berita Foto	Sarana Tol Ibu Kota Baru: Foto udara sarana proyek pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di KM 13. Tol Balikpapan-Samarinda terdiri dari lima seksi yang memiliki panjang 99,35 KM
2	Media Indonesia (Hal. 2)	31 Agustus 2019	Harga Tanah di Sepaku Naik Tiga Kali Lipat	Dampak dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur
3	Media Indonesia (Hal. 2)	31 Agustus 2019	Percepat Pengembangan Empat Destinasi Wisata	Presiden mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata Borobudur, Danau Toba, serta Lombok
4	Koran Tempo (Hal. 1)	31 Agustus 2019	Menghayal Ibu Kota	Pemindahan ibu kota negara sudah ditetapkan ke Kaltim, pembangunannya pun ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang
5	Bisnis Indonesia (Hal. 10)	31 Agustus 2019	Masterplan 35 WPS Bakal Direvisi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun perubahan rencana induk di 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) seiring dengan cepatnya perubahan dan dinamika yang ada.
6	Kompas (Hal. B.)	31 Agustus 2019	Jakarta Bukan Batavia	Jakarta adalah Batavia dan disebut representasi kepentingan belanda bukan rakyat
7	Kompas (Hal. 15)	31 Agustus 2019	Percepat Pengembangan Kawasan Borobudur	Presiden Joko Widodo meminta pengembangan kawasan pariwisata Borobudur dipercepat
8	Kompas (Hal. 6)	31 Agustus 2019	Opini	Mobilitas Cerdas untuk Ibu Kota Baru
9	Kompas (Hal. 1)	31 Agustus 2019	Kajian Lingkungan "Hutan Kota" Ditunggu	Komplek ibu kota negara di Kaltim akan mengusung hutan kota. Berbagai kalangan tengah menunggu kajian
10	Kompas (Hal. 5)	31 Agustus 2019	Canberra dan Sayembara Kota	Konsensus umum dari semua koloni terkait dipilihnya Canberra adalah bahwa ibu kota tidak boleh dekat pantai dan tidak harus memiliki jumlah penduduk besar
11	Koran Tempo (Hal. 2)	2 September 2019	Dua Kecamatan Akan Jadi Kawasan Inti Ibu Kota	Kementerian ATR/BPN memastikan 2 kecamatan yang akan menjadi kawasan inti ibu kota negara
12	Kompas (Hal. 3)	2 September 2019	Optimisme Sambut Pemindahan Ibu Kota	Narasi optimis muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota. Responden Kompas berhadapan pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan pembangunan dengan di Jawa
13	Kompas (Hal. 5)	2 September 2019	Dari Pesisir ke Pedalaman	Di negara Brazil ibu kota pindah dari pesisir ke pedalaman
14	Kompas (Hal. 14)	2 September 2019	Dua Ruas Tol Akan Menopang Ibu Kota Baru	pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di KM 13 akan menjadi salah satu tol penopang ibu kota negara
15	Kompas (Hal. D)	2 September 2019	Dua Pemkab Tunggu Detail Rencana	Pemkab Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara saat ini menunggu detail rencana untuk ibu kota negara.
16	Kompas (Hal. D)	2 September 2019	Pemindahan Ibu Kota Jadi Momentum Menarik Investasi	Ibu kota akan menjadi daya tarik banyak kalangan, salah satunya investor
17	Media Indonesia (Hal. 2)	2 September 2019	Kemajuan tidak Menafikan Warga Lokal	Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan masyarakatnya untuk menyongsong pemindahan ibu kota

Judul	Berita Foto	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Sarana Tol Ibu Kota Baru: Foto udara sarana proyek pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di KM 13. Tol Balikpapan-Samarinda terdiri dari lima seksi yang memiliki panjang 99,35 KM		



SARANA TOL IBU KOTA BARU: Foto udara suasana proyek pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di Km 13, Jalan Raya Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin. Tol Balikpapan-Samarinda terdiri dari lima seksi yang memiliki panjang 99,35 kilometer akan menjadi salah satu akses masuk ibu kota negara baru dari arah Balikpapan dan Samarinda.

Judul	Harga Tanah di Sepaku Naik Tiga Kali Lipat	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Dampak dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur		

IBU KOTA BARU (1)

Harga Tanah di Sepaku Naik Tiga Kali Lipat

PEMINDAHAN pusat pemerintahan telah sah diumumkan Presiden Joko Widodo, Senin (26/8). Wilayah irisan dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartangera itu dipilih sebagai lokasi baru ibu kota. Wartawan *Media Indonesia*, **Milham Ramadhan Avisena**, Jumat (30/8), melakukan perjalanan ke Kecamatan Sepaku. Perjalanan dimulai dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Laporan mulai diturunkan secara berseri mulai hari ini.

UNTUK mencapai Sepaku, ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, melalui jalur penyeberangan laut di Pelabuhan Sema yang dengan feri. *Media Indonesia* menggunakan jalur darat tanpa penyeberangan. Dibutuhkan 2 jam 30 menit dengan kendaraan roda empat untuk sampai ke Kecamatan Sepaku.

Dengan mengambil rute menuju Petung, perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Jalan utama yang berakhir di Penajam itu dipenuhi lubang. Sepanjang perjalanan, truk pengangkut material pertambangan terlihat hilir-mudik.

Di jalan utama sepanjang 40 km itu pemandangan proyek pertambangan terhampar. Sesekali juga terlihat sisa pembakaran hutan seiring laju mobil. Hunian penduduk baru ditemui di Desa Semoi 2. Namun, desa itu nyaris kosong. Banyak hunian diselimuti debu jalanan yang diterbangkan kendaraan yang melintas.

Tidak kurang dari 20 menit setelah melalui Desa Semoi 2, kami tiba di pusat Kecamatan Sepaku, Desa Tengin Baru. Di sana terdapat kantor-kantor mulai Koramil hingga kantor Kecamatan Sepaku.

Di desa itu, *Media Indonesia* singgah dan mencoba untuk mendapatkan tanggapan dari sejumlah warga soal pemindahan ibu kota. Dewi, 48, salah satunya, ia mengatakan, setelah Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota, warga Desa Tengin Baru sontak riuh mengurus sertifikat tanah guna bukti kepemilikan.

Berbondong-bondongnya warga mengurus sertifikat tanah karena mencuatnya isu kenaikan harga jual tanah yang merupakan dampak lain dari pemindahan ibu kota. "Harganya naik dua tiga kali lipat. Dulu harga 1 hektare tanah saya Rp30 juta. Kemarin, setelah diumumkan Presiden, sudah ada yang menawar Rp120 juta," ujar dia di rumahnya, Jumat (30/8). (X-6)

Judul	Percepat Pengembangan Empat Destinasi Wisata	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Presiden mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata Borobudur, Danau Toba, serta Lombok		

Percepat Pengembangan Empat Destinasi Wisata



ANTARA/LATIFUR JAOR/NUSRANO

BERSEPEDA KE BOROBUDUR: Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo bersepeda bersama di kompleks Candi Borobudur di Magelang, Jateng, kemarin. Kunjungan tersebut terkait dengan rencana pengembangan lokasi wisata Borobudur.

PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan para menteri Kabinet Kerja di Patio Main Jogo, Plataran Borobudur Resort and Spa, Magelang, Jawa Tengah, kemarin, membahas percepatan pengembangan empat destinasi wisata, termasuk Borobudur.

"Pengembangan empat destinasi wisata yang sudah beberapa kali saya sampaikan, yakni Danau Toba, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Borobudur harus terus dipercepat. Ini juga berkaitan dengan nanti 2020 selesainya Bandara Internasional Yogyakarta yang kita harapkan pada Maret 2020 telah bisa digunakan secara penuh," ujar Presiden dalam pengantarnya.

Serelah konektivitas diselesaikan, Presiden Jokowi ingin agar tata ruang, tata kelola, dan ma-

najemen segera dibenahi. Dia meminta rencana induk dan rencana detail pengembangan kawasan wisata Borobudur segera diselesaikan.

Jokowi menyoroti pula perkembangan di lapangan yang masih belum cepat, termasuk soal kelembagaan tata kelola di Borobudur. "Beberapa pengembangan fisik seperti tadi pagi yang sudah kita lihat, saya kira masih sangat banyak hal yang perlu dikerjakan di kawasan sekitar Candi Borobudur."

Untuk itu, Presiden akan terus memantau semua perkembangan di lapangan. Dirinya juga akan meminta laporan secara berkala setiap tiga bulan. Borobudur merupakan satu dari empat destinasi wisata prioritas pemerintah, selain Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika. Pengembangan

kawasan Mandalika telah dipengang oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). "Kemarin kita lihat juga Labuan Bajo saya juga optimis nanti akhir tahun 2020 juga akan selesai," kata Jokowi.

Secara khusus, dia meminta seluruh kementerian terkait memberikan dukungan penuh. "Ini sangat penting. Kita harapkan betul-betul di akhir 2020 produk ini betul-betul siap untuk dipromosikan secara besar-besaran."

Pengembangan destinasi wisata terus dipercepat karena, menurut Presiden Jokowi, sektor pariwisata bisa menjadi motor peningkatan devisa di tengah gelojak ekonomi global. Sebelumnya, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau langsung kawasan Candi Borobudur. Dia memastikan, sebagai situs bersejarah, kawasan Borobudur akan ditangani dengan baik. (Dro/X-8)

Judul	Mengkhayal Ibu Kota	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 1)		
Resume	Pemindahan ibu kota negara sudah ditetapkan ke Kaltim, pembangunannya pun ditargetkan selesai dalam lima tahun mendatang		

Mengkhayal Ibu Kota

Mau menebak siapa menteri yang kira-kira dipertahankan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini? Ada teman yang bilang, pantau saja siapa menteri yang paling banyak berbicara soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

EDISI, 31 AGUSTUS 2019

OLEH: TEMPO

Putu Setia

@mpujayaprema

Mau menebak siapa menteri yang kira-kira dipertahankan Presiden Joko Widodo pada periode kedua ini? Ada teman yang bilang, pantau saja siapa menteri yang paling banyak berbicara soal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Jangan sepenuhnya percaya. Tapi memang soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sangat menyita tayangan televisi dan cuitan media sosial. Begitu Presiden Joko Widodo meminta izin memindahkan ibu kota dalam pidato kenegaraan, pujian langsung membahana. Saat Kalimantan Timur disebut belakangan, pujian kian mengalir. Lahan yang luas milik negara, kawasan yang minim bencana, hutan yang masih perawan, dan seterusnya. Bahwa kawasan itu pernah dilanda gempa dengan tsunami dahsyat tak lagi terdengar beritanya. Apalagi lubang-lubang tambang batu bara yang masih menganga dan sebagian lahan dikuasai keluarga Prabowo Subianto tak lagi digubris orang.

Presiden Jokowi menyebutkan kajian ibu kota baru sudah dilakukan. Cuma tak dijelaskan, siapa pakar yang ikut mengkaji, apa saja yang sudah dikaji, dan bagaimana uraiannya. Dia sudah keburu minta izin kepada DPR. Lalu Ketua DPR siap menanti usul adanya rancangan undang-undang. Jadi? Landasan hukum saja belum dirancang, ibu kota baru sudah mulai terbayang, betapa megah dan dahsyatnya. Kita sibuk berkhayal.

Para menteri gencar memberi pernyataan apa yang dibangun. Menteri Perhubungan, misalnya, siap membangun MRT (moda raya terpadu), LRT (light rail transit), dan BRT (bus rapid transit). Itu yang canggih-canggih selain infrastruktur dasar. Menteri PU dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan nama kementeriannya, membangun gedung dan rumah dinas. Betapa banyaknya itu, dari istana sampai gedung lembaga tinggi negara, 34 gedung kementerian, ribuan

rumah dinas, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Semua menteri terkait mengaku sudah merancang fasilitas yang diperlukan, seolah-olah (atau mungkin sudah yakin) mereka bakal dipilih lagi oleh Jokowi.

Apa cukup waktu lima tahun membangun ibu kota baru? Masyarakat begitu yakin apa pun yang dibangun Jokowi pasti bisa. Bandung Bondowoso saja bisa membangun Candi Roro Jonggrang dalam waktu semalam, masak Jokowi tak bisa membangun ibu kota dalam lima tahun? Optimisme ini justru membuat sebagian besar pegawai negeri menolak pemindahan ibu kota. Mereka khawatir fasilitas buat keluarganya masih terkendala.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara meredam kegelisahan itu dengan menyebutkan kepindahan pegawai negeri tentu dilakukan setelah semua fasilitas tersedia, termasuk perumahan, sekolah, dan seterusnya. Menteri mengingatkan agar jangan panik. Barangkali pegawai negeri ini tak menyadari kepindahan itu masih lama, bahkan mungkin baru terwujud setelah mereka pensiun. Bukankah Presiden Jokowi saja tak akan pindah ke ibu kota baru karena sudah pensiun?

Kehebohan memindahkan ibu kota begitu berlebihan. Mestinya pakai tahap-tahapan, adakan kajian yang matang tentang lokasi. Lalu susun rencana yang rapi, termasuk biayanya. Buat landasan hukumnya bersama DPR, bukan cuma minta izin. Yang terjadi sekarang lebih banyak ributnya. Habis energi untuk urusan yang masih berstatus khayalan. Padahal masih banyak urusan lain yang lebih mendesak.

Papua bergolak serius, BPJS bermasalah, intoleransi terus terjadi justru di tempat-tempat umat beribadah, hoaks masih menyebar, ancaman kekeringan menunggu. Apakah negara atau ada menteri yang berfokus memperhatikan urusan ini? Atau karena urusan ini rada berat diselesaikan, lantas dicari isu untuk menutupi, yakni pindah ibu kota?

Judul	Masterplan 35 WPS Bakal Direvisi	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Hal. 10)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun perubahan rencana induk di 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) seiring dengan cepatnya perubahan dan dinamika yang ada.		

► PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

Masterplan 35 WPS Bakal Direvisi

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun perubahan rencana induk di 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) seiring dengan cepatnya perubahan dan dinamika yang ada, termasuk rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

*Riki Maulana
rhimaulana@bint.com*

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hadi Sucahyo mengatakan dalam empat tahun terakhir pembangunan infrastruktur yang pesat membuat kondisi di wilayah pengembangan strategis (WPS) berubah.

► **Revisi WPS diharapkan bisa rampung pada akhir 2019 atau pada 2020 dan akan dituangkan dalam bentuk Permen PUPR.**

► **Dibutuhkan Rp88,54 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Penajam dan Kutai Kartanegara.**

Dia menambahkan, pembangunan di wilayah strategis juga akan disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dia menggambarkan, kehadiran infrastruktur baru telah mengubah lanskap di wilayah pengembangan.

Misalnya, di Sumatra, kehadiran jalan tol Trans Sumatra perlu bakal memantik gairah pertumbuhan ekonomi baru sehingga perencanaan infrastruktur harus direncanakan dengan terpadu.

"Kami akan revisi WPS. Secara jumlah mungkin masih sama tapi delinesasinya berubah. Ada wilayah yang nanti lebih gemuk WPS-nya," jelas Hadi kepada *Bisnis*, Jumat (30/8).

Dia menyebut, salah satu wilayah yang akan mengalami perubahan deliniasi adalah Ka-



limantan Timur. Sebagaimana diketahui, dua kabupaten yang terletak di Kalimantan Timur sudah diumumkan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

Untuk diketahui, sejak 2015 Kementerian PUPR menggunakan pendekatan berbasis ke-wilayah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. WPS menjadi basis dari perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur.

Pendekatan kewilayahan juga dilakukan agar pemba-

ngunan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.

Hadi menyebut, sejauh ini pihaknya telah menetapkan 14 indikator dalam evaluasi WPS, antara lain rancangan teknokratis RPJMN, kawasan metropolitan, kawasan strategis tematik, dan koridor pengembangan jalan tol dan jalan nasional.

Indikator lainnya meliputi bendungan terbangun usulan ibu kota negara, ibukota provinsi, dan pulau-pulau kecil

terluar.

Dia memperkirakan, revisi WPS bisa rampung pada akhir 2019 atau pada 2020. Revisi akan tertuang dalam perubahan Keputusan Menteri PUPR.

Hadi menerangkan, setiap WPS memiliki kawasan tematik seperti kawasan industri, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, maupun kawasan perdesaan prioritas.

MULAI 2020

Di sisi lain, Kementerian PUPR bakal segera menyusun desain infrastruktur dasar di lokasi ibu kota negara yang baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur dasar dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyusunan desain dimulai dari sekarang setelah Presiden Joko Widodo menetapkan lokasi ibu kota negara baru.

Infrastruktur dasar yang akan dibangun tersebut meliputi jalan, air bersih, dan sanitasi.

Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun kawasan permukiman dan perkantoran.

"Desain kami mulai sekarang sampai dengan pertengahan tahun depan. InsyaAllah gro-

undbreaking untuk prasarana dasar bisa dimulai tahun depan," jelasnya.

Basuki menerangkan, setelah skema tahun jamak atau *multi-years contract* (MYC). Biaya pembangunan infrastruktur dasar akan berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Penggunaan porsi APBN, lanjut Basuki mencapai 19% dari total biaya sebanyak Rp466 triliun.

Dengan kata lain, dibutuhkan Rp88,54 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga berniat menggunakan skema design and build pada pembangunan kawasan permukiman dan perkantoran.

Skema ini menurut Basuki lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional yang harus membuka lelang konsultan desain terlebih dahulu.

"Kita punya kriteria desain jadi langsung tender fisik. Ini sama seperti renovasi GBK [Gelora Bung Karno], lebih cepat," tegasnya. ■

Judul	Jakarta Bukan Batavia	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Kompas (Hal. B.)		
Resume	Jakarta adalah Batavia dan disebut representasi kepentingan belanda bukan rakyat		



JAKARTA BUKAN BATAVIA



Dalam kajian pemindahan ibu kota negara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta adalah Batavia dan disebut representasi kepentingan Belanda, bukan rakyat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat Indonesia memerlukan ibu kota baru.

Alasan yang mengusik fakta sejarah karena di awal masa kemerdekaan, Presiden Soekarno membenahi dan membangun Jakarta untuk membersihkannya dari konotasi kolonial. Batavia adalah bagian pembentuk Jakarta, tetapi tak bisa disamakan dengan Jakarta.

NELI TRIANA

Susan Blackburn dalam buku *Jakarta, Sejarah 400 Tahun* menulis, "Sebagaimana Belanda telah dua kali membangun Batavia baru, pertama di Kota dan kemudian di Gambir, pada era ini Soekarno memindahkan poros utama kota. Ia bertekad memberikan gambaran modern bagi Jakarta merdeka yang difokuskan di Jalan Thamrin yang membentang dari sudut barat daya Lapangan Merdeka menuju Jalan Sudirman dan Kebayoran Baru. Daerah ini bersih dari konotasi kolonial, serta akan menampilkan karya-karya hebat para arsitek dan kontraktor Indonesia."

Kutipan pidato Soekarno pada tahun 1962 memperkuat pernyataan Blackburn. Sebagian kutipannya, yaitu "Berikan Djakarta satu tempat yang hebat di dalam kalbu rakyat Indonesia sendiri, sebab Djakarta adalah milik daripada orang-orang Djakarta. Djakarta adalah milik daripada seluruh bangsa Indonesia. Bahkan Djakarta jadi mercusuar daripada perjuangan seluruh umat manusia. Ya, the New Emerging Forces."

Monumen Proklamasi Kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur yang dianggap terlalu sederhana digantikan dengan Monumen Nasional (Monas) yang megah dan jadi pusat kota Jakarta. Soekarno, seperti dipaparkan Blackburn, memerintahkan dibangunnya gedung kaca enam lantai di bekas Monumen Proklamasi Kemerdekaan untuk menyimpan cetak biru proyek pembangunan Indonesia.

Ada foto memperlihatkan Soekarno dan maket-maket Kompleks Asian Games di Senayan, Planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jembatan Semanggi, rancangan penataan Jalan MH Thamrin, hingga Taman Ria Ancol.

Jakarta juga dilengkapi dengan Monumen Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng dan Patung Selamat Datang di dekat Hotel Indonesia. Ada Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang berdampingan. Refleksi kebinekaan Indonesia, representasi identitas, dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building* diupayakan lewat simbol-simbol tersebut.

Dengan banyaknya proyek pembangunan di Jakarta dan masih bergolaknya sebagian wilayah di luar ibu kota, migrasi penduduk dari daerah ke pusat negeri ini terus terjadi. Seperti dikutip dari *Djakarta Dalam Angka 1969*, penduduk Jakarta pada 1948 sekitar 823.000 jiwa dan membengkak menjadi 3.813.000 pada 1965.

Survei 1953 terhadap imigran menghasilkan fakta bahwa me-



reka ke Jakarta karena alasan ekonomi. Pada tahun 1957, diperkirakan ada 10.000 orang setiap hari pergi pulang Bogor-Jakarta dengan menggunakan kereta api untuk bekerja. Sensus 1961 menunjukkan 16 persen angkatan kerja Jakarta sebagai pegawai negeri.

Namun, upaya memenuhi fasilitas kota berjalan lambat, berbanding terbalik dengan ledakan penduduk Jakarta juga dengan proyek mercusuar yang dikerjakan di ibu kota itu.

Bobroknya layanan transportasi publik sudah ada sejak dekade awal pascakemerdekaan. Selain itu, masalah kebutuhan perumahan terus menggumpal membesar dan sulit dipecahkan.

Pemerintah membangun kawasan Kebayoran Baru dengan prioritas untuk perumahan pegawai negeri. Dari 1948 hingga 1956, disebut baru 6.033 rumah selesai dibangun di Kebayoran Baru dan sebagian besar untuk pegawai negeri. Sementara pada 1952, pejabat kota Jakarta menyebut sudah ada 30.000 permukiman ilegal di sana dan meningkat menjadi 70.000 permukiman ilegal di tahun 1957. Diperkirakan, ada 275.000 orang tinggal di rumah-rumah tak sehat.

Apa yang terjadi di Jakarta mengundang kritik, terutama dari tokoh-tokoh daerah di luar Jakarta. Terpusatnya pembangunan di ibu kota menyedot begitu banyak dana pemerintah pusat yang memicu bias seakan pemerintah hanya mengutamakan Jawa dibandingkan daerah lain.

Blackburn memaparkan bahwa sentimen anti-Jawa menguat. Pada 1955, ada kampanye di parlemen untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain. Baru pada 1960, Soekarno mengakhiri polemik dengan menyatakan Jakarta tetap ibu kota negara.

Pemandangan Tugu Monas, Jakarta Pusat, dan Taman Medan Merdeka yang mengelilinginya, 3 Januari 2019 (kiri). Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, 20 Agustus 2019 (kanan).

Pusat ekonomi

Disadari kemudian subsidi besar dari pusat untuk proyek di Jakarta tidak dapat terus dilakukan. Jakarta didorong agar membiayai kebutuhannya sendiri dengan tetap menyangkut status ibu kota. Kebijakan pemerintah saat itu adalah meningkatkan usaha swasta penduduk setempat sebagai basis pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah bisnis baru bermunculan di Jakarta awal 1950-an, termasuk industri film Indonesia. Nasionalisasi untuk menggantikan orang asing dalam perputaran ekonomi di negeri juga terus berlangsung.

Pemerintah, misalnya, mendirikan bank nasional Indonesia, membeli Scheepwerf atau galangan kapal Antjol milik Belanda pada 1952 dan pabrik General Motors milik Amerika Serikat pada 1955. Pada tahun itu, untuk pertama kali Indonesia memiliki perusahaan perkapalan dan manufaktur kendaraan bermotor.

Pada 1957, terjadi gelombang besar nasionalisasi dengan pengambilalihan semua bisnis Belanda yang sebagian ada di Jakarta setelah kegagalan diplomasi dengan Belanda saat membahas Irian Barat (Papua Barat).

Peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi perkotaan di Jakarta dan sekitarnya amat mendominasi. Sesuai data sensus 1961, mayoritas penduduk bekerja di bidang transportasi, perdagangan, pemerintahan. Pe-

kerjaan terbesar bersifat padat karya karena sebagian besar industri di ibu kota ini masih menggunakan pekerja kasar.

Saat ini, tujuh dekade pascakemerdekaan, kondisi Jakarta secara fisik tentu telah banyak berubah. Namun, dalam isu-isu tertentu sedikit banyak tidak beranjak jauh dari masa lalu. Jakarta tetap sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi Indonesia dengan banyak problem mulai perumahan hingga transportasi.

Dengan 10 juta jiwa penduduk Jakarta dan sekitar 30 juta jiwa se-Jabodetabek, ibu kota masih menjadi magnet pergerakan ekonomi. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan bahwa sesuai hasil penelitian Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) fase 2, pada 2018-2029, di Jabodetabek terjadi sampai 100 juta perjalanan per hari. Perjalanan itu sebagian dilakukan untuk kegiatan ekonomi, termasuk pergi pulang kerja.

Jakarta kini dan sekitarnya, seperti sudah menjadi pengetahuan publik, memang sarat masalah tak jauh beda dengan di masa awal kemerdekaan dulu. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta dan Jabodetabek berpotensi terkena gempa-tsunami megathrust.

Selain itu, kawasan ini juga mengalami keterbatasan suplai air baku dan penurunan muka tanah, ancaman banjir setiap tahun, kemacetan tinggi, dan kualitas udara tak sehat yang terus membelenggu.

Meskipun demikian, Jakarta tetap menjadi pusat segalanya. Bappenas mencatat, Jakarta menjadi pusat perdagangan, jasa keuangan, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pendidikan, serta industri pengolahan.

Bias bahwa pembangunan terpusat di Jakarta dan Jawa masih kuat.

Sedia payung

Untuk itu, keputusan memindahkan ibu kota ke daerah lain disertai upaya membenahi Jakarta dan dibangun murni menjadi pusat bisnis dan ekonomi bisa jadi adalah kebijakan yang tepat. Meski demikian, kajian detail dan penuh pertimbangan berdasarkan fakta serta penelitian yang memadai tentu harus menjadi dasar kebijakan tersebut.

Apalagi, seperti dipaparkan Menteri PPN/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro saat berunding ke harian *Kompas*, Rabu (28/8/2019), pemerintah pusat telah memiliki kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI), serta pengembangan kawasan metropolitan dan kota baru. Kebijakan itu kini tengah dalam perencanaan hingga pelaksanaan.

Kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan program urban regenerasi bagi Jakarta, seperti disampaikan Bambang Brodjonegoro, akan turut mendorong kebijakan pembangunan yang telah ada.

"Pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa akan mendorong pemerataan pembangunan. Lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, yaitu perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru dan perdagangan antara provinsi di Indonesia khususnya dari Pulau Jawa ke provinsi luar Jawa juga antarprovinsi di luar Jawa," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Target besar dan mulia ibu kota baru di Kalimantan Timur sedikitnya bakal menyedot Rp 466 triliun dan melibatkan lahan hingga 180.000 hektar. Ada ratusan ribu orang akan dipindahkan. Warga lokal, bentang alam, vegetasi, dan fauna lokal pasti akan terimbas. Perubahan bakal turut dirasakan di seluruh negeri.

Untuk itu, tentu butuh perencanaan matang berdasarkan penelitian dan kajian yang tidak boleh serampangan. Dibutuhkan kesanggupan memitigasi potensi dampak baik dan buruk saat ini dan nanti.

Merangkul partisipasi publik dalam mengelola ruang, termasuk ruang kota baru, dan dalam penataan Jakarta adalah keniscayaan.

Menarik kesimpulan tidak tepat seperti melihat Jakarta sebagai Batavia tidak seharusnya dilakukan apalagi jadi salah satu landasan kebijakan. Bisa jadi ini karena kajian yang dilakukan kurang memadai. Hal-hal seperti ini jika terus dianggap sepele dapat memicu masalah di kemudian hari.

INFOGRAFIS ANTHI

Judul	Percepat Pengembangan Kawasan Borobudur	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Kompas (Hal. 15)		
Resume	Presiden Joko Widodo meminta pengembangan kawasan pariwisata Borobudur dipercepat		

PARIWISATA

Percepat Pengembangan Kawasan Borobudur

MAGELANG, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta pengembangan pariwisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dipercepat. Tata ruang, penentuan zona pembangunan pariwisata, tata kelola manajemen, serta kelembagaan kawasan wisata Borobudur segera dibenahi.

Saat memimpin rapat kabinet terbatas di Candi Borobudur, Jumat (30/8/2019), Presiden meminta agar rencana induk dan detail pengembangan kawasan Borobudur segera diselesaikan untuk kemudian ditetapkan. Dari penataan fisik, misalnya, perlu ada pembangunan akses jalan dari Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo ke Borobudur.

"Ini banyak alternatif dan kemarin juga dari Pak Gubernur Jawa Tengah ada usulan, juga dari Pak Bupati Purworejo. Masukan-masukan yang ada sangat baik dan nantinya akan segera kita putuskan setelah studi lapangannya selesai," tutur Presiden.

Percepatan penataan kawasan wisata Borobudur dilakukan karena sektor pariwisata dinilai mampu menjadi motor peningkatan devisa di tengah gejolak ekonomi global serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional.

Rapat diikuti antara lain Menhub Budi Karya Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menpar Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gu-



KOMPAS/FERGANATA INDRALIA RYATMOKO

Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan kepala daerah, Jumat (30/8/2019), meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Presiden juga memimpin rapat kabinet terbatas di sana untuk mempercepat pengembangan kawasan wisata Borobudur.

bernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

Perhatian pemerintah terhadap penataan kawasan wisata sebelumnya juga ditunjukkan dengan kunjungan Presiden ke Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Di tempat-tempat itu, Presiden juga menggelar rapat terbatas.

Presiden menyatakan akan memantau perkembangan penataan tersebut setiap tiga bulan. "Saya akan melihat progres A sampai Z sehingga tiap tiga bulan akan saya tagih kinerjanya," katanya.

Presiden berharap seluruh penataan kawasan wisata itu rampung pada 2020 sehingga

dapat diikuti promosi besar-besaran. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti bandara dan akses jalan menuju tempat wisata, diharapkan bisa mendukung pariwisata.

Untuk kawasan wisata Borobudur yang merupakan situs bersejarah, Presiden mengatakan, ketika wisatawan yang datang sangat banyak, jumlah turis yang naik ke candi dalam satu waktu akan diatur. Hal itu penting, karena ditengarai terjadi penurunan bangunan candi.

Bandara baru

Kawasan wisata Borobudur akan ditunjang oleh Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) yang ditargetkan rampung dibangun pada Maret 2020. BIY

dengan luas terminal penumpang mencapai 219.000 meter persegi itu memiliki kapasitas sampai 27 juta penumpang per tahun.

Sebelum ke Borobudur, Presiden meninjau BIY yang kini mulai digunakan untuk tujuh jalur penerbangan domestik. BIY sementara ini bisa diakses dari Kota Yogyakarta menggunakan kereta api sampai Stasiun Wojo, Purworejo. Pembangunan jalur kereta dari Stasiun Tugu, Yogyakarta, ke BIY akan rampung Desember 2020.

Mulai Maret 2020, menurut Budi Karya, akan disiapkan bus dari Stasiun Wojo ke BIY yang disubsidi, sehingga gratis. Frekuensi ketersediaan bus diharapkan kurang dari setengah jam. (INA/EGI)

Judul	Opini	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Kompas (Hal. 6)		
Resume	Mobilitas Cerdas untuk Ibu Kota Baru		

Mobilitas Cerdas untuk Ibu Kota Baru

Studi Karya Sumadi
Menara Perhubungan III

Akhirnya kita semua tahu jawaban di balik teka-teki lokasi mana yang dipilih menjadi ibu kota negara (IKN) yang baru, yaitu Balikpapan. Seorang yang merupakan teman kolega saya di Kalimantan Timur, seperti ditanyakan Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus lalu. Tahun ini berada dalam dua wilayah administratif sekaligus, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Pasir Utara.

Berbeda dengan Jakarta yang merupakan ibu kota peninggalan kolonial Belanda (Batavia), IKN III yang baru ini didesain dan dibangun di era Industri 4.0. IKN ini rencananya akan segera mulai dibangun dan selesai pada 2024. Periode konstruksi ini relatif singkat, tetapi pembangunan di Brasil, ibu kota baru Brasil, memakan waktu hanya 41 bulan.

Hanya saja, sebuah IKN yang "bijak" (baik taman hutan kota), cerdas, dan indah" pembangunannya bisa lebih lama karena kompleksitasnya berbeda. Apalagi kagidabawanya menyebarkan laut ke pulau lain berjarak 1.270 kilometer dari Jakarta.

Beberapa tahun mendatang, III seharusnya sudah memasuki tahap implementasi awal Industri 4.0 sedikit melangkah agak maju. Karena itu, perlu disiapkan sistem pengolahan kota yang cerdas, termasuk sistem konektivitas atau sistem transportasi massalnya. Sistem transportasi pintar (intelligent transport) menjadi bagian integral kota cerdas (smart city) ini.

Revisi Industri 4.0 mendorong perkembangan sistem MRT Cerdas, mulai dari stasiun cerdas dan kereta tanpa awak/pe-

manis, yang lebih pintar dan lebih iri energi. Kereta full otomatis pada semua fungsi, termasuk self maintenance, mampu dioperasikan secara otomatis, berjalan, dan berhenti. Sistem pintarnya mampu memantap kereta yang berhenti dan peralatan pengamanannya yang dipasang dapat mendeteksi rintangan jalan serta beramankan diri.

Sistem transportasi pintar dan kota cerdas terkait dengan konsep lebih besar, smart mobility (SM), yang merupakan cara berpikir baru dan revolusioner tentang bagaimana kita dapat tiba di tempat tujuan secara lebih bersih, lebih aman, lebih efisien. Konsep SM meliputi satu rentang luas dari transportasi antar moda, mulai dari bersepeda, bus listrik, LRT, driverless MRT, kendaraan otomatis, taksi pintar, dan lainnya. Prinsip utamanya meliputi fleksibilitas, efisiensi, integrasi, teknologi bersih (nonpollute), dan keamanan. Transportasi multimoda memungkinkan perancangan memilih yang terbaik di situasi tertentu yang dibutuhkan.

AGT listrik, ekonomis, dan ramah lingkungan

Dengan penduduk 1,5 juta jiwa, IKN baru tetap akan menjadi salah satu kota besar di III. Belum lagi jika ditambah pertumbuhan kota-kota satelit di sekitarnya meskipun nanti IKN baru itu "dilingkungi" dengan apotik hijau hutan kota di sekitarnya.

Salah satu pilihan moda transportasi untuk ibu kota baru adalah *automated guideway transit* (AGT) berbasis bus atau roda baja, yang juga tanpa awak/pe-

ngemud (driverless), seperti Tokaido AGT di Tokyo, Jepang, dan Mark II SkyTrain di Vancouver, Kanada. Sistem ini bisa berate tetap (*fixed route system*) atau ganda dan bisa berkala kecil (*low frequency*) hingga masal sebagai MRT. AGT ini jika dibangun di rute busway (*driverless*) dikenal sebagai "kereta layang tanpa awak".

Mengapa dibangun layang? Alasan utama biasanya karena kepadatan dan intensitas bangunan relatif tinggi. Namun, untuk IKN baru, bisa saja karena alasan memberi kesempatan bagi warga kota dan turis menikmati pemandangan indah kota baru yang full taman hutan kota beserta lanskap lainnya (suasana, danau, dan lain-lain).

Moda transportasi tanpa awak AGT jauh lebih murah ketimbang MRT berbasis rel di bawah tanah (*underground*). Secara ekonomis dan lingkungan, AGT lebih layak untuk IKN baru kita.

Dominasi mobilitas ASN

Aktivitas berlalu lintas di IKN baru akan didominasi aparat sipil negara (ASN), para ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, dan mahasiswa. Tak ada pergerakan para ibu rumah tangga ke pasar tradisional karena di ibu kota baru hanya ada pasar/ toko modern di pusat kota dan setiap sudutnya kota.

Pergerakan masal ASN dari pusat-pusat permukiman di seluruh bagian wilayah kota menuju pusat kota dan zona perkantoran pemerintah dilayani dua moda utama, bus listrik pintar dan MRT Cerdas berbasis AGT, dengan terminal utama

dan stasiun utama terletak di pusat kota (*central business district*). ASN berangkat ke dan pulang dari kantor sebagian besar menggunakan AGT dan stasiun-stasiun AGT ini berakhir di pusat kota sebagai stasiun utama.

Selanjutnya, dari pusat kota ke zona perkantoran pemerintahan dan antar kantor pemerintahan/ lembaga negara serta lokasi negara dilayani dengan bus-bus listrik, bersepeda, atau fasilitas pedestrian. Asunannya, terdapat buffer baik berupa ruang terbuka hijau maupun sungai/ saluran yang memisahkan kawasan/ sektor-sektor komersial (perdagangan, perbankan, dan pertokoan) dengan sektor-sektor pemerintahan, dan kedutaan besar/ perwakilan internasional.

Setiap stasiun AGT terhubung dengan halte bus listrik pada rute-rute tertentu dan di setiap blok permukiman terdapat halte bus listrik yang terhubung dengan jaringan jalan kolektor berpola radial dengan stasiun AGT terlokasi.

Tak ketinggalan, di IKN baru dimungkinkan sistem taksi listrik pintar tanpa pengemudi. Layanan taksi ini dilengkapi GPS dan sejumlah sensor untuk mendeteksi jalur jalan, bangunan, trotoar, pepohonan, rambu lalu lintas, dan penyeberang jalan untuk menjamin keamanan berlalu lintas.

Sistem transportasi yang ideal untuk IKN baru bisa diwujudkan secara bertahap. Namun, setidaknya trace dan ruang untuk sistem transportasi publik yang komprehensif di IKN baru

dapat ditagikan jauh-jauh hari. IKN dengan udara segar dan teduh dengan banyaknya hutan/taman kota dan jalur khusus sepeda, sangat ideal bagi bersepeda, bahkan menarik masyarakat ke keribanya secara rutin jika jaraknya tak berlebihan/jauh dari rumahnya. Untuk kota, IKN baru III akan menjadi habitat *flexible dan agile* bagi penghuni kota dan para komuter dari kota-kota satelit di sekitarnya untuk bermobilitas secara cerdas dan ramah lingkungan.

POJOK

Untuk rasi berakhlak rusak di Papua. Siapa berminat aja?

Persiapkan SDM setempat di ibu kota baru. Jangan cuma jadi penonton.

Penyediaan SDM rugikan negara Rp 4,5 triliun. Yang ambil untung justru banyak.

Mang Uiril

Judul	Kajian Lingkungan “Hutan Kota” Ditunggu	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Kompas (Hal. 1)		
Resume	Komplek ibu kota negara di Kaltim akan mengusung hutan kota. Berbagai kalangan tengah menunggu kajian		

PEMINDAHAN IBU KOTA

Kajian Lingkungan ”Kota Hutan” Ditunggu

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan mengusung konsep kota hutan atau *forest city*. Berbagai kalangan di daerah yang menjadi lokasi ibu kota baru itu menanti detail konsep kota hutan dan kajian lingkungan dari pemerintah pusat.

Besar kemungkinan Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara akan menjadi lokasi kompleks istana dan pemerintahan. Adapun Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Selat Makassar akan menjadi basis pertahanan dan keamanan ibu kota yang baru.

Di Sepaku, Samboja, dan Muara Jawa terdapat sejumlah kawasan konservasi berupa hutan lindung dan taman hutan raya. Sepaku berbatasan dengan Hutan Lindung Bukit Bangkirai di sisi selatan yang tersambung dengan Hutan Lindung Sungai Wain di Balikpapan. Selain itu, ada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang mencakup wilayah Sepaku dan Samboja. Di bagian selatan Samboja ada tempat penyelamatan orangutan yang dikelola Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS).

Kawasan konservasi di sana menyuplai kebutuhan hidup bagi warga setempat hingga Kota Balikpapan. Konsep ibu kota berwawasan lingkungan dinanti untuk meyakinkan publik bahwa pembangunan tak akan banyak mengganggu keseimbangan alam atau ekosistem yang ada.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam kunjungan ke

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

Kajian Lingkungan "Kota Hutan" Ditunggu

(Sambungan dari halaman 1)

Redaksi *Kompas*, Rabu (28/8/2019), mengatakan, pihaknya memiliki kajian lengkap soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim, baik dari aspek lingkungan hidup maupun sosial budaya. Pembangunan ibu kota yang baru mengusung konsep kota dalam hutan.

"Bukan hutan kota. Jadi, salah satunya bagaimana menerjemahkan ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan, pepohonan dalam kota. Bangunannya pun harus *green design*, baik dari sisi energi maupun tanaman yang akan dibiarkan tumbuh," ujar Bambang.

Ia juga menegaskan, pemerintah berkomitmen tak akan mengganggu kawasan konservasi. Bahkan, kerusakan kawasan konservasi, seperti di Bukit Soeharto, akan direhabilitasi.

Agusdin, Manajer Yayasan Pro Natura, yang merupakan mitra pemerintah dalam mengelola Hutan Lindung Sungai Wain, khawatir pembangunan dan perkembangan ibu kota negara yang baru mengancam kawasan konservasi di sekitarnya.

"Jangan sampai misalnya merusak Sungai Wain yang merupakan sumber air bagi Pertamina dan warga Kota Balikpapan," ujarnya, Jumat.

Air dari Sungai Wain diperlukan Pertamina dalam proses produksi di kompleks kilang Balikpapan yang menyuplai kebutuhan bahan bakar minyak untuk wilayah Kalimantan dan kawasan Indonesia timur. Selain itu, hampir 680.000 warga Balikpapan juga bergantung pada ketersediaan air dari Daerah Aliran Sungai Wain.

Adapun di Samboja terdapat kawasan Samboja Lestari yang dikelola Yayasan BOS atau BOSF. Yayasan itu merehabilitasi 127 orangutan di kawasan hijau seluas 1.800 hektar.

Anggota Staf Komunikasi Samboja Lestari, Nur Isnaini, mengatakan, pembangunan ibu kota baru dikhawatirkan juga berdampak pada upaya pelestarian orangutan. "Kawasan yang bising tidak baik bagi rehabilitasi orangutan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Laboratorium Politik Sosial dan Ekonomi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Bernaulus Sa-

ragih mengatakan, pembangunan besar-besaran akan berdampak lingkungan bagi Bukit Soeharto. Kawasan itu menjadi tempat sebaran pohon meranti, keruing, mahang, mengkungan, ara, medang, kapur, dan kayu tahan. Sejumlah fauna, seperti orangutan, beruang madu, macan dahan, dan landak, juga hidup di kawasan itu.

"Kontribusi Bukit Soeharto itu sebagai wilayah penelitian bagi pendidikan. Selain itu, sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Jika kawasan itu tidak dijaga dengan baik, penyalahgunaan hutan di sana berpotensi menyebabkan bencana, seperti longsor dan banjir," katanya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bernardus Wisnu Widjaja mengingatkan, besar-kecilnya ancaman bencana pada lokasi ibu kota baru amat bergantung pada tata ruang yang dibuat berbasis risiko bencana. Langkah itu juga mesti diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

(CIP/BRO/NCA/
BOW/FRD/ERK)

Judul	Canberra dan Sayembara Kota	Tanggal	31 Agustus 2019
Media	Kompas (Hal. 5)		
Resume	Konsensus umum dari semua koloni terkait dipilihnya Canberra adalah bahwa ibu kota tidak boleh dekat pantai dan tidak harus memiliki jumlah penduduk besar		

PEMINDAHAN IBU KOTA (2)

Canberra dan Sayembara Kota

Aneka pertanyaan mengapa Canberra dipilih atau terpilih sebagai ibu kota Australia masih mengemuka sampai saat ini. Mengapa bukan Sydney yang cerah atau Melbourne yang indah? Mengapa Canberra, kota di wilayah yang tampak terpencil, antah-berantah, justru menjadi ibu kotanya?

Kalangan sejarawan kontemporer menilai, sejatinya baik Melbourne maupun Sydney bahkan tidak pernah dianggap sebagai pilihan untuk ibu kota Australia. Alasannya, suhu Melbourne dan Sydney terlalu panas di tengah musim panas.

"Alasan paling signifikan, yang disetujui oleh semua politikus pada saat itu, adalah bahwa orang kulit putih hanya dapat benar-benar bersemangat dan memimpin di tengah iklim yang relatif dingin," kata David Headon, penasihat sejarah pemerintah di Wilayah Ibu Kota Australia (ACT), sebagaimana dikutip media *National Geographic*.

Konsensus umum dari semua koloni terkait dipilihnya Canberra adalah bahwa ibu kota tidak boleh dekat pantai dan tidak harus memiliki jumlah penduduk besar, sebagaimana digadang-gadang oleh warga Sydney.

"Mereka tidak bisa memilihnya di pantai karena alasan keamanan dari sisi laut," kata David. "Tapi, saat itu juga merupakan periode yang sangat buruk terkait penyebaran penyakit, terutama di permukaan laut; jadi, memang ada kekhawatiran ganda."

Situs resmi Pemerintah ACT mencatat, selama 21.000 tahun, wilayah Canberra telah menjadi rumah bagi orang-orang Ngunnawal.

Bukti keberadaan mereka ada dalam bukti arkeologis yang ditemukan di Birrigai Rock Shelter di Cagar Alam Tidbinbilla, dalam lukisan batu di Taman Nasional Namadgi dan di tempat lain di ACT.

Ketika orang-orang Eropa menetap di daerah itu pada awal 1820-an, ratusan orang Aborigin tinggal di daerah itu. Mereka bertemu secara teratur untuk menggelar aneka pesta. Mereka kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil.

Canberra memang dipilih sebagai ibu kota Australia di tengah persaingan sengit, terutama antara Sydney dan Melbourne. Awal era 1900-an, Pemerintah New South Wales memerintahkan kajian tentang lokasi yang tepat bagi Pemerintah Persemakmuran Australia. Laporan itu menyarankan tiga tempat, yaitu Bombala, Yass-Canberra, dan Orange.

Keputusan untuk memilih Yass-Canberra sebagai opsi utama diambil pada 1908 oleh Parlemen Persemakmuran. Tak lama, penyurvei Persemakmuran, Charles Scrivener, kemudian dikirim untuk memilih lokasi. Instruksinya adalah memilih tempat yang indah, khas, dan dengan pemandangan apik.

Wilayah ACT itu pun diumumkan pada 1 Januari 1911. Hal itu dilanjutkan dengan diadakannya kompetisi internasional untuk merancang sebuah ibu kota Australia. Sejarah mencatat, lebih dari 130 rancangan diterima dalam kompetisi itu. Terpilih sebagai pemenang adalah arsitek Amerika, Walter Burley Griffin, serta istrinya yang bernama Marion Mahony Griffin. (BENNY D KOESTANTO)

Judul	Dua Kecamatan Akan Jadi Kawasan Inti Ibu Kota	Tanggal	2 September 2019
Media	Koran Tempo (Hal. 2)		
Resume	Kementerian ATR/BPN memastikan 2 kecamatan yang akan menjadi kawasan inti ibu kota negara		

EKONOMI DAN BISNIS

Dua Kecamatan Akan Jadi Kawasan Inti Ibu Kota

Survei pemerintah mengerucut ke Kecamatan Samboja dan Sepaku.

EDISI, 2 SEPTEMBER 2019



JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyatakan masih mencari koordinat inti calon ibu kota negara di Kalimantan Timur. Direktur Jenderal Tata Ruang BPN, Abdul Kamarzuki, memastikan lokasi inti bisa diputuskan sebelum dimulainya pembangunan infrastruktur dasar pada tahun depan. "Selain untuk mengawali pembangunan di 40 ribu hektare lahan pertama, titik itu juga menentukan perluasan ibu kota," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Abdul, penentuan lokasi inti sudah mengerucut ke dua kecamatan, yakni Samboja di Kutai Kartanegara dan Sepaku di Penajam. Kementerian Agraria, melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrarian, berencana mengirim tim survei ke Kecamatan Sepaku, Selasa mendatang. "Kami harus memeriksa saat ini pemanfaatan lahannya seperti apa."

Abdul memastikan sudah mengecek kondisi Kecamatan Samboja. Dari pengamatan awal, ucap Abdul, ditemukan permukaan lahan batu bara yang tergolong dangkal. "Ada kemungkinan gampang terbakar, tapi masih dicek lagi."

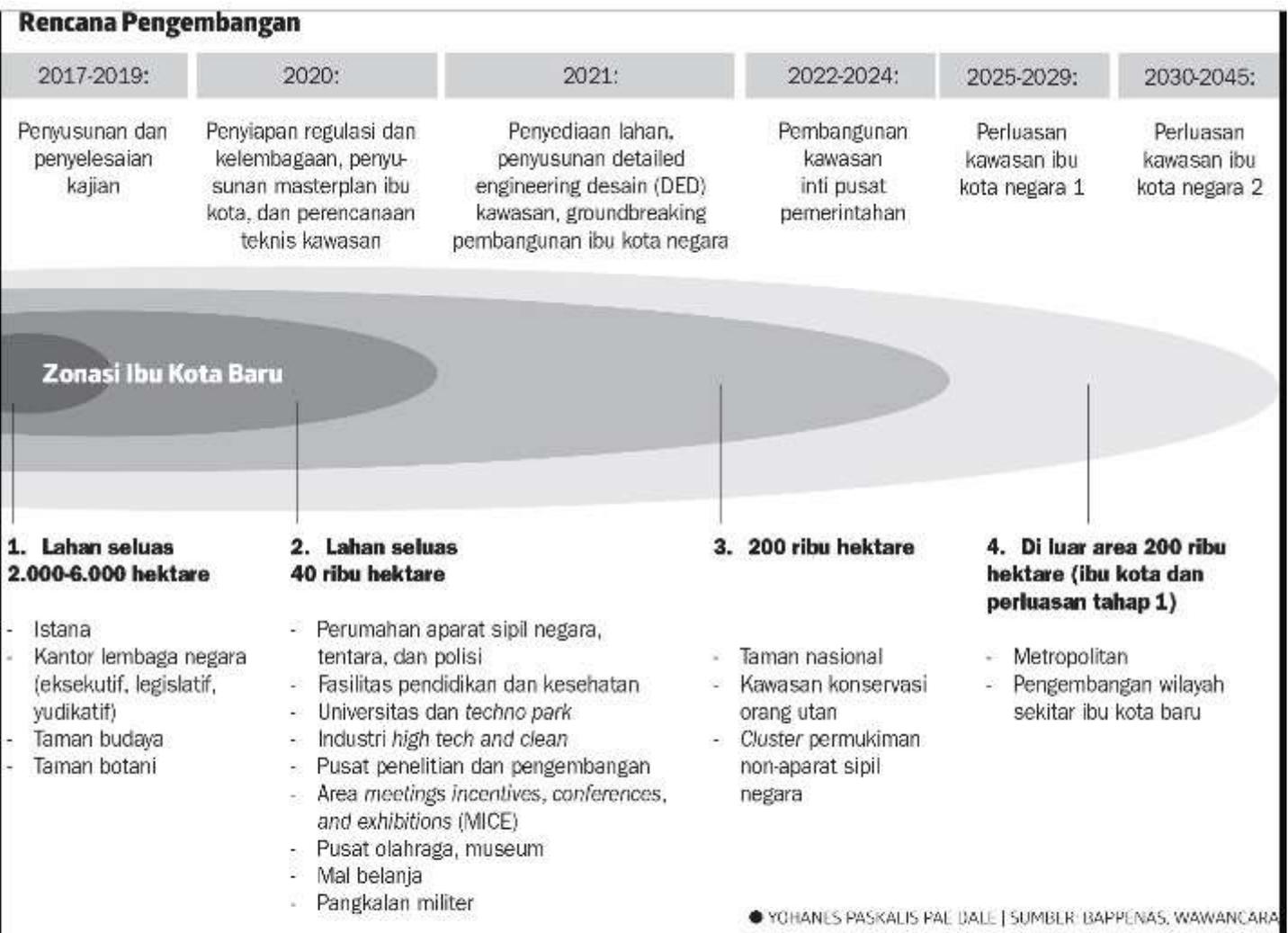
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan ibu kota akan dipindahkan ke wilayah perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Di sana, pemerintah sudah mengamankan lahan seluas 180 hektare. Pengerjaan infrastruktur dasar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menasar ring pertama seluas 6.000 hektare, kemudian dilanjutkan ke ring kedua seluas 40 ribu hektare. Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terbit pada 21 Agustus menunjukkan pembangunan pusat ibu kota akan dilanjutkan dengan dua tahap perluasan, yang rencananya dikerjakan dalam 20 tahun sejak 2025.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soepriyadi Prawiradinata, mengatakan ibu kota baru dibangun dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH). Dalam perencanaan Bappenas, separuh luas ibu kota baru harus menerapkan RTH, meski jenisnya bisa beragam, dari taman botani hingga kompleks olahraga. "Jadi tak akan mengganggu kawasan konservasi, malah bisa dikembangkan karena cocok dengan forest city," ucapnya.

Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara, Imron Bulkin, mengatakan penelitian ibu kota baru masih berjalan hingga tahun depan. Bappenas sendiri sedang melelang salah satu paket studi kelayakan teknis senilai Rp 24,99 miliar yang dianggarkan dari APBN 2019. Hasil prakualifikasi paket diumumkan pada Juli lalu dan meloloskan lima dari 103 peserta. Lima entitas yang diketahui lolos itu adalah PT Boston Consulting Indonesia, PT Bina Karya (Persero), PT Roland Berger Indonesia, McKinsey Indonesia, dan PT Yodya Karya (Persero). Pemenang tender rencananya diumumkan pada 26-27 September mendatang.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan lembaganya akan mulai mengerjakan infrastruktur dasar pada pertengahan 2020. Meski belum dimasukkan ke pagu keuangan tahun depan, Kementerian PUPR sudah memperkirakan kebutuhan pertama sebesar Rp 865 miliar, meliputi pengerjaan jalan, penyediaan air baku dan drainase, serta pengerjaan desain rumah tinggal aparat sipil.

"Untuk studinya pun ada anggaran sendiri, perencanaan kami tetap berbasis pada masterplan Bappenas," ujarnya. **PUTRI ADITYOWATI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE**



RALAT

Pada berita "KPPU Mencurigai Keseragaman Tingkat Bunga Fintech" yang dimuat di halaman 24 *Koran Tempo* edisi 29 Agustus 2019, tertulis: "Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hendrikus Passagi, tak menampik fintech pendanaan rawan kartel". Pernyataan tersebut keliru. Yang benar, Hendrikus Pasagi mengatakan fintech dengan bisnis model *marketplace* justru mematahkan mata rantai broker atau perantara bisnis konvensional yang rawan kartel. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.

Judul	Optimisme Sambut Pemindahan Ibu Kota	Tanggal	2 September 2019
Media	Kompas (Hal. 3)		
Resume	Narasi optimis muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota. Responden Kompas berhadapan pemindahan ibu kota akan menciptakan pemerataan pembangunan dengan di Jawa		

Optimisme Sambut Pemindahan Ibu Kota

Narasi optimistis muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota. Responden Jajak Pendapat Kompas berharap hal itu bisa mewujudkan pemerataan pembangunan kawasan di luar Jawa.

Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, lebih dari separuh responden setuju ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru akan meliputi sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Persiapan pembangunan mulai dilaksanakan tahun ini, sedangkan pemindahan efektif dilakukan tahun 2024.

Jika ditilik lebih jauh, alasan terbanyak dari responden yang mengaku setuju adalah karena Jakarta dinilai sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai ibu kota (47,3 persen). Alasan terbanyak kedua, responden setuju ibu kota pindah agar ekonomi lebih merata (24,2 persen). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, lebih dari separuh perekonomian nasional (produk domestik bruto/PDB) disumbang Pulau Jawa. Bahkan 20,85 persen di antaranya disumbang Jabodetabek. Mayoritas responden setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa pemerataan ekonomi diperlukan agar daerah di luar Pulau Jawa tidak semakin timpang dengan Pulau Jawa.

Kalimantan Timur dipilih karena, antara lain, dinilai minim risiko bencana serta strategis secara geografis karena berada di tengah Indonesia. Selain itu, daerah ini dekat dengan wilayah yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda, serta memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

Sementara itu, alasan terbanyak bagi responden yang tidak setuju pemindahan ibu kota adalah jarak yang makin jauh (48,4 persen) dan berbiaya besar (31,4 persen). Seperti diumumkan, pemindahan ibu kota diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun. Sumber pendanaan itu antara lain dari APBN (Rp 74,4 triliun),



swasta (Rp 127,3 triliun), dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Rp 265,2 triliun). Bahan paparan Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengilustrasikan sejumlah dampak positif pemindahan ibu kota terhadap perekonomian. Pertama, perekonomian akan lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya sehingga membantu menurunkan kesenjangan di tingkat regional dan nasional. Kedua, keterkaitan ekonomi provinsi di ibu kota baru dengan provinsi lain di sekitarnya akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain.

Keyakinan
Hanya saja, tidak sedikit pula

responden jajak pendapat yang kurang meyakini dan tidak meyakini akan terjadi pemerataan ekonomi atau infrastruktur di luar Jawa dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan. Peningkatan aktivitas di lokasi ibu kota baru diyakini akan terjadi. Namun, juga masih ada silap skeptis apakah hal ini juga akan dirasakan daerah lain di kawasan Indonesia bagian timur.

Selain itu, kritik yang kemudian muncul ialah apakah otonomi daerah kurang berperan sehingga untuk pemerataan pembangunan harus melalui pemindahan ibu kota? Padahal, tiap daerah memiliki wewenang membuat kebijakan sendiri yang ramah terhadap investasi. Selain otonomi daerah, juga terdapat kebijakan lain yang mendorong pemerataan, yakni dana

JAJAK PENDAPAT KOMPAS

desa dan infrastruktur fisik.

Hasil jajak pendapat Kompas juga menunjukkan pandangan responden yang berimbang terhadap keyakinan bahwa ibu kota di Kalimantan minim risiko gempa bumi dan tsunami.

Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah mengkaji kajian secara mendalam dengan kesimpulan lokasi terpilih itu yang paling ideal sebagai ibu kota baru. Akan tetapi, Kalimantan bukan tidak memiliki ancaman bencana seperti banjir

dan kebakaran lahan. Selain itu riwayat konflik sosial juga harus dimitigasi pemerintah. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Herry Yogaswara menyatakan, pemerintah harus melakukan kajian komprehensif melibatkan intelektual lokal (Kompas 29/5).

Pendapat responden juga terbelah ketika pemindahan ibu kota dikaitkan dengan legislatif. Hasil jajak pendapat menunjukkan jawaban berimbang antara responden yang yakin dan tidak yakin bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan mampu menyelesaikan regulasi pemindahan ibu kota.

Kajian Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, setidaknya ada lima un-

dang-undang yang perlu direvisi terkait pemindahan ibu kota, yakni UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kendala legislasi

Perubahan terhadap UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan membuat sifat provinsi ini menjadi hanya daerah otonom dan tidak memiliki kekhususan lagi sebagai ibu kota. Pengaturan terhadap DKI Jakarta juga akan sama dengan daerah

lainnya di bawah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru, yakni UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Perencanaan di Ibu Kota Negara. Sementara UU yang harus dibuat sejak awal adalah UU tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang kota. Kedua UU tersebut menjadi dasar hukum bagi pemindahan IKN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, tahun 2019-2021 menjadi masa penyusunan dasar hukum dan aspek teknis. Sementara itu, naskah akademik dan pembahasan RUU yang jadi dasar ibu kota baru akan tuntas 2020 sehingga akhir 2020 pembangunan fisik ibu kota sudah dimulai di Kalimantan (Kompas 28/8).

Hasil jajak pendapat juga menunjukkan pendapat berimbang antara responden yang yakin dan tidak yakin bahwa proses politik di parlemen terkait pemindahan ibu kota negara akan berjalan lancar. Mengingat pembahasan UU di DPR kerap berlangsung alot. Pemerintah akan menyerahkan sejumlah RUU yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara ke DPR akhir tahun ini. DPR menargetkan pembahasan regulasi akan dilakukan setelah DPR periode 2019-2024 dilantik pada Oktober 2019.

Terlepas dari beragam tantangan yang harus dihadapi demi memindahkan ibu kota, lebih dari separuh responden meyakini Presiden Jokowi akan mampu merealisasikan rencana ini. Rasa optimistis publik ini yang harus terus dijaga pemerintah.

(IDA AYU GRHMITIKA SAITYA/LITBANG KOMPAS)

Judul	Dari Pesisir ke Pedalaman	Tanggal	2 September 2019
Media	Kompas (Hal. 5)		
Resume	Di negara Brazil ibu kota pindah dari pesisir ke pedalaman		

PEMINDAHAN IBU KOTA (3)

Dari Pesisir ke Pedalaman

Tak ada kota seperti Brasilia. Kota di dataran tinggi di antara hulu Sungai Tocantins, Parana, dan Sao Francisco itu menjadi ibu kota Brasil yang ketiga sejak era kolonialisme Portugis setelah Salvador dan Rio de Janeiro.

Didesain seperti burung jika dilihat dari atas oleh perencanaan tata kota Lucio Costa dan arsitek Oscar Niemeyer, Brasilia menjadi ibu kota Brasil pada 21 April 1960 menggantikan Rio de Janeiro, ibu kota Brasil, sejak 1763.

Brasilia yang berjarak sekitar 1.000 kilometer barat laut dari Rio kemudian ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO tahun 1987 karena keindahan tata kota, arsitektur modern, juga perannya dalam pembangunan Brasil.

Di masa sebelum kemerdekaan, Brasil sangat bergantung pada perdagangan gula. Ibu kota koloni Portugis di Brasil saat itu, Salvador, yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Tome de Sousa tahun 1549, berada dekat dengan sentra perkebunan tebu. Sebagai kota pesisir, Salvador berperan penting dalam perdagangan gula dan hasil bumi lainnya.

Namun, Belanda kemudian mampu memproduksi gula dengan biaya lebih murah di negara-negara koloni Karibia-nya. Di saat yang sama, penambangan emas di Brasil tengah populer. Hal itu yang, di antaranya, melatarbelakangi pindahnya ibu kota dari Salvador ke Cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro atau Rio de Janeiro atau Rio yang dekat dengan kawasan utama tambang emas pada 1763.

Sebagai ibu kota, Rio tidak terlalu strategis. Posisinya yang berada di sebuah lembah tidak menyisakan banyak ruang untuk pengembangan sebuah ibu kota. Rio juga dinilai rentan terhadap serangan dari laut. National Geographics menggambarkan Rio sebagai kota pesisir yang semrawut. Desain tata kota Rio dinilai memperlambat kinerja karena gedung-gedung perkantoran berjauhan dan lalu lintas padat.

Presiden Brasil Juscelino Kubitschek yang mulai berkuasa tahun 1955 berani menjanjikan untuk memindahkan ibu kota dari Rio ke Brasilia. Brasilia pun dibangun dalam waktu 41 bulan, antara 1956 dan 1960.

Sejarah panjang wacana pemindahan ibu kota Brasil dari Salvador ke tempat lain sejatinya sudah muncul di era 1789, seiring menguatnya gerakan separatisme melawan pemerintah kolonial Portugis. Setelah Brasil meraih kemerdekaan pada 1822, Jose Bonifacio de Andrada e Silva, negarawan yang berperan dalam kemerdekaan Brasil, menulis memoar tentang perlunya membangun ibu kota baru.

Setelah puluhan tahun, wacana pemindahan ibu kota itu masuk di dalam konstitusi pertama Republik Brasil, yaitu pada 1891. Setahun kemudian, sekelompok ilmuwan menyurvei topografi, iklim, sumber daya, flora, fauna, dan lain-lain di dataran tinggi di jantung Brasil. Setelah melewati ratusan tahun—sempat berpindah ke Rio—konsep di atas diwujudkan dalam pembangunan Brasilia yang menempati lahan seluas kurang lebih 5.850 kilometer persegi pada 1955.

Lucio Costa mendesain Brasilia dengan konsep dua sumbu menyilang dan membagi wilayah ke dalam blok-blok dengan peruntukan yang berbeda. Misalnya, ada blok khusus untuk kantor kedutaan negara asing dan blok perkantoran pemerintah. Brasilia juga dibangun untuk memacu pertumbuhan. Tanggal 21 April 1960 dipilih sebagai tanggal pindahnya ibu kota ke Brasilia. Itu merupakan tanggal saat Tiradentes, salah satu pemimpin dari Mineiro yang memperjuangkan kemerdekaan Brasil di abad ke-18, meninggal. Pemindahan pada tanggal itu disimbolkan sebagai kebebasan dan keberanian rakyat Brasil menyongsong masa depan.

(ADHITYA RAMADHAN)

Judul	Dua Ruas Tol Akan Menopang Ibu Kota Baru	Tanggal	2 September 2019
Media	Kompas (Hal. 14)		
Resume	pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang berada di KM 13 akan menjadi salah satu tol penopang ibu kota negara		

INFRASTRUKTUR

Dua Ruas Tol Akan Menopang Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS — Dua ruas jalan tol di Kalimantan Timur, yakni Tol Balikpapan-Samarinda dan rencana jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara, akan mendukung ibu kota baru. Kedua tol tersebut diharapkan menopang mobilitas orang dan barang di kawasan tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, akhir pekan lalu, mengatakan, dua ruas jalan tol itu akan mendukung pengembangan Kalimantan Timur, termasuk ibu kota negara yang baru yang akan berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejauh ini baru dua ruas tol itu yang ada dalam perencanaan BPJT. Ruas Tol Balikpapan-Samarinda Seksi II-IV, sepanjang 66,4 kilometer antara Samboja-Samarinda, dijadwalkan beroperasi Oktober 2019. Ruas itu merupakan bagian atau porsi yang dikerjakan investor yang kini realisasinya di atas 90 persen.

Proyek jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 kilometer kini masuk tahap prakualifikasi lelang. Pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai proyek prakarsa badan usaha itu dan menunggu masuknya dokumen lelang dari calon investor. Proses lelang ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpandangan, ibu kota baru perlu infrastruktur pendukung mobilitas. Mayoritas memanfaatkan infrastruktur yang ada di Balikpapan, baik pelabuhan maupun bandara. Ke depan, seiring pemindahan ibu kota negara, perlu pengembangan kapasitas infrastruktur yang ada.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero) Tbk Achmad Baiquni mengatakan, pemindahan ibu kota memerlukan pembangunan gedung dan berbagai fasilitas pendukung. Bagi BNI, hal itu merupakan peluang untuk mengembangkan penyaluran kredit di sektor properti yang saat ini masih di bawah 10 persen. (NAD)

Judul	Dua Pemkab Tunggu Detail Rencana	Tanggal	2 September 2019
Media	Kompas (Hal. D)		
Resume	Pemkab Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara saat ini menunggu derail rencana untuk ibu kota negara.		

PEMINDAHAN IBU KOTA

Dua Pemkab Tunggu Detail Rencana

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, masih menunggu konsep pembangunan ibu kota negara baru. Mereka siap menyesuaikan pengembangan daerah dengan konsep pengembangan ibu kota negara baru dari pusat.

Sebelumnya, Jumat (30/8/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan mengatakan, ibu kota negara baru akan dibangun di tanah milik negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Lahan yang digunakan pada tahap awal pembangunan adalah 40.000 hektar dari total rencana 180.000 ha.

Namun, sebelumnya akan disiapkan payung hukum berupa undang-undang yang ditargetkan selesai 2020, di antaranya soal pembentukan badan otorita penyiapan ibu kota baru. Setelah itu, tahap konstruksi dimulai.

"Kami akan menyesuaikan proyeksi pembangunan dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Pe-

nelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah PPU Yunita Liliyana Damayanti, Minggu (1/9/2019).

Targetnya, pembangunan awal selesai tahun 2024 di lahan seluas 6.000 ha. Meski belum ada sosialisasi lengkap, pemma akan menyesuaikan pengembangan daerah sesuai konsep pemerintah pusat.

Proyeksi Pemkab PPU, Kecamatan Sepaku akan dikembangkan jadi pusat perdagangan, jasa, dan sosial ekonomi. Hal itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sebagian besar petani program transmigrasi sejak 1975.

Menurut Yunita, rencana itu dibuat karena posisi Sepaku strategis, berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan.

Jarak Sepaku sekitar 70 kilometer dari pusat Kota Balikpapan atau 40 km ke Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Samboja, yang ditargetkan rampung tahun ini. Saat ini, untuk menempuh dua daerah itu, masyarakat harus melalui jalan provinsi melewati hutan lindung serta hutan negara yang dikelola swasta.

Saat ini sudah dibangun rumah sakit pratama yang akan beroperasi tahun depan

di Sepaku. Ada juga layanan pendidikan, yakni 2 SMA negeri dan 3 SMK negeri. Pemerintah juga berencana membangun sekolah tinggi pertanian.

Rencana Kukar

Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengembangkan wilayah di pesisir Samboja sebagai pintu masuk-keluar berbagai kebutuhan dan manusia melalui jalur laut. Di Kelurahan Amborawang Laut, misalnya, saat ini terdapat pelabuhan batubara. Kutai Kartanegara adalah salah satu penghasil batubara terbesar di Kalimantan Timur.

"Di wilayah Kecamatan Samboja dan Muara Jawa yang ada di pesisir akan kami kembangkan pelabuhan untuk distribusi barang dan manusia. Pengembangan disesuaikan potensi, yakni bidang perikanan, pertanian, dan batubara," kata Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Wiyono.

Di Samboja juga terdapat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI/Mulawarman yang masih dibangun. Hingga ini, rencana pusat terkait pemindahan ibu kota negara belum terperinci. (CIP)

Judul	Pemindahan Ibu Kota Jadi Momentum Menarik Investasi	Tanggal	2 September 2019
Media	Kompas (Hal. D)		
Resume	Ibu kota akan menjadi daya tarik banyak kalangan, salah satunya investor		

PEMINDAHAN IBU KOTA JADI MOMENTUM MENARIK INVESTASI

Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Masyarakat yang mendukung umumnya sepakat dengan perlunya pemerataan pembangunan sebagai salah satu tujuan pemindahan ibu kota.



Akan tetapi, tidak jarang pula masyarakat mengkritik dan mengingatkan pemerintah soal pentingnya kajian terhadap aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Soal aspek yang disebut paling akhir, pemerintah telah merjamin bahwa megaprojek ini tidak akan mengganggu neraca keuangan negara.

Biaya untuk memenuhi kebutuhan pemindahan ibu kota ditaksir berkisar Rp 466 triliun-Rp 485 triliun. Sejak jauh hari, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan bahwa dana untuk pemindahan ibu kota tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), tetapi juga dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung pihak swasta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, porsi terbesar sumber pembiayaan ibu kota akan diperoleh lewat KPBU. Melalui skema ini, pemerintah mencari sumber pendapatan dari kerja sama pengelo-

lan aset yang ada di Jakarta dan ibu kota baru, baik dengan pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

"Jadi, nanti ada pemasukan dari situ yang kemudian langsung diarahkan untuk ikut membangun ibu kota baru," ujarnya kepada *Kompas*, awal pekan lalu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi KPBU akan mendominasi untuk membiayai pemindahan ibu kota baru, yakni 54,6 persen (Rp 265,2 triliun). Sementara estimasi pendanaan dari pihak swasta 26,2 persen (127,3 triliun). Adapun APBN akan mengisi porsi 19,2 persen (Rp 93,5 triliun).

Tukar guling

Skema investasi swasta dan KPBU nyatanya sangat terbuka terhadap masuknya dana investasi dari luar wilayah Indonesia. Bambang mengatakan, jika investor membawa uang untuk membangun ibu kota baru, jelas tangan pemerintah terbuka lebar.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Soelaeman

Soemawinata menilai, pembiayaan dari pemodal asing sangat memungkinkan diterapkan pada skema KPBU untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Hal ini justru ia nilai dapat meminimalkan risiko lantaran pemerintah tidak secara langsung berhubungan dengan investor.

Dengan skema manajemen aset berupa penambahan volume, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan pengembang untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Skema ini layaknya "tukar guling" sebagai kompensasi atas pembelian atau penggunaan aset yang sudah tidak lagi menjadi fasilitas pemerintahan di Jakarta.

"Perlu diingat juga, saat ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, pengembangan Jakarta dan sekitarnya akan terus berlanjut menjadi kota keuangan, bisnis, perdagangan, serta pusat jasa berskala regional dan global," kata Soelaeman.

Ruang investasi

Keterbukaan pemerintah terhadap masuknya investor asing mendanai megaprojek

pemindahan ibu kota disambut oleh salah satu lembaga multilateral, yakni Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Investment Infrastructure Bank/AIIB).

Saat ditemui *Kompas* pertengahan pekan kemarin di Jakarta, Wakil Presiden AIIB Lucky Eko Wuryanto mengatakan, kabar soal pemindahan ibu kota Indonesia sudah menjadi perhatian pasar ekonomi global. Pihaknya menilai peluang AIIB untuk terlibat dalam pendanaan megaprojek tersebut sangat terbuka.

"Saat ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah mengenai pendanaan pemindahan ibu kota. Akan tetapi, kalau ke depan ada peluang (pendanaan), tentu akan kami kaji sesuai kerangka kebijakan AIIB," ujar Lucky.

AIIB dapat turut terlibat dalam menyalurkan pembiayaan jika visi pemindahan ibu kota, yaitu mengurangi ketimpangan, pemerataan pembangunan, dan menumbuhkan pusat ekonomi baru, berhasil diejawantahkan melalui misi pembangunan yang jelas.

Sebagai lembaga keuangan multilateral, AIIB memiliki misi membangun infrastruktur yang memberi dampak berkelanjutan di negara-negara berkembang. Beroperasi sejak awal 2016, hingga Agustus 2019, AIIB telah menyalurkan pendanaan hingga 8,53 miliar dollar AS untuk 46 proyek di sejumlah negara.

Peluang AIIB untuk turut terlibat dalam mendanai megaprojek ini terbuka, baik melalui skema KPBU maupun investasi swasta. Skema KPBU sendiri sudah pernah dilakukan AIIB di Indonesia ketika bersinergi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) untuk menggarap proyek pengembangan infrastruktur regional yang nilainya 100 juta dollar AS.

"Dalam proyek bersama PT Sarana Multi Infrastruktur, AIIB menyalurkan dana kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit daerah hingga pasar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur," kata Lucky.

(DIMAS WARADITY NUGRAHA)

Balihu ucapan selamat terpilihnya ibu kota baru terpampang di jalan utama Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan menjadi ibu kota baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

KOMPAS/REZA FATMOKI

Judul	Kemajuan tidak Menafikan Warga Lokal	Tanggal	2 September 2019
Media	Media Indonesia (Hal. 2)		
Resume	Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan masyarakatnya untuk menyongsong pemindahan ibu kota		

IBU KOTA BARU (2)

Kemajuan tidak Menafikan Warga Lokal

PENETAPAN wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai bagian dari Ibu kota baru merupakan keputusan tepat. Pasalnya, lokasi geografis Sepaku yang berada di tengah-tengah Indonesia itu terbelang aman dari bencana.

Sepaku menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan Presiden Jokowi menjadi bagian Ibu kota negara baru bersama Kecamatan Sambaja, di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Luas wilayah Sepaku yang mencapai 3.333,03 km persegi dan dihuni 176 ribu jiwa dinilai menjadi pertimbangan lain. Banyaknya lahan kosong dan juga dimiliki sebagian besar negara menjadi nilai tambah atas dipilihnya wilayah di PPU itu.

"Kondisi topografi kami landai dan berbukit-bukit. Jadi, dari permukaan laut dari tsunami," ujar Wakil Bupati PPU, Hamdam, kepada wartawan *Media Indonesia M Tiham Ramadhan Avisena dan Pius Erlangga* di kediamannya di Penajam, kemarin.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan warga masyarakat PPU aktif menyongsong perubahan baru yang mengahmpiri mereka.

"Kami berharap masyarakat memahami arti penting pemindahan Ibu kota. Apa manfaat yang bisa mereka petik," kata Hamdam.

Namun, pihaknya mengkhawatirkan fenomena terkait pemindahan pusat pemerintahan tersebut, yaitu saat ada kemajuan pembangunan di situ, ada warga lokal yang termarginalisasikan.

"Masyarakat jangan tergesa rayuan pemodal yang ingin menguasai lahan. Kelebihan kita ialah memiliki wilayah. *Insya Allah* ini menjadi *bojoring* untuk sama-sama maju," lanjut Hamdam.

Selama ini perekonomian warga PPU di topang sektor pertanian, perkebunan, dan lautan. Hamdam berharap ke depan sektor jasa juga menjadi penopang perekonomian baru untuk kesejahteraan warga.

Kini Pemkab PPU fokus meningkatkan

mutu SDM yang memakan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, dia mengharapkan warga lokal aktif dilibatkan dalam proses pembangunan.

"Harapan kami ada perlakuan khusus, yaitu bagaimana mengakomodasi warga kami yang standarnya masih berada di bawah warga Jakarta," ujar Hamdam.

Camat Sepaku, Risman Abdul, sebelumnya mengutarakan warga menyambut baik keputusan pemindahan Ibu kota negara ke wilayahnya. Perbaikan ekonomi menjadi salah satu alasan.

Risman meyakini konsep Ibu kota ramah lingkungan yang digagas pemerintah pusat juga tidak merusak wilayah hijau di Sepaku.

"Konsep kota baru ini kan *smart city, green city, dan forest city*. Nanti kurang lebih 50%-60% di sisi bangunan itu masih hutan. Jadi, bangunan bertentensi kepada lingkungan." (OI./X-3)

Pemkab Kukar... | Him 11



MELIUS BILANGKA

TRANSPORTASI AIR BALKIPAPAN-PENAJAM: Penumpang turung dari perahu *kitok* di Pelabuhan Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan, Pelabuhan Kampung Baru memiliki dua buah dermaga yang menjadi akses transportasi air dengan menggunakan perahu *kitok* dan *speedboat* dari Balikpapan menuju Penajam.